



AREA 1

MANAGEMENT PERUBAHAN

iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti



1

MANAJEMEN PERUBAHAN



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Jefriyanto
Ketua



Sri Haryanti
Sekretaris



Hafidz Iksan B.
Sekretaris



Tarnoto
Anggota Bidang
Manajemen Perubahan



M. Radhi Zhafari
Anggota Bidang
Manajemen Perubahan



Agung Wisnu L.
Anggota Bidang
Manajemen Perubahan



Aria Yudha
Anggota Bidang
Manajemen Perubahan

ANGGOTA TIM KERJA AREA I





DAFTAR ISI

1. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi

**LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN APRIL 2022**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk memastikan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, maka tim kerja melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini memuat catatan atas hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja. Catatan tindak lanjut tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahap rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jakarta, April 2022

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas

Jefriyanto

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memantau perkembangan dan sejauh mana realisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi/masukan atas proses realisasi rencana kerja, guna membantu mengukur pencapaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah untuk mengamati perkembangan dan kemajuan dari kinerja tim pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi, target yang telah ditetapkan, dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN APRIL 2022

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja	SK Tim sudah ada dan sudah ditandatangani	Sudah ditindaklanjuti.
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Masih berupa draft, karena menunggu kompilasi dari semua area perubahan	Masih dalam proses
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Laporan monitoring dan evaluasi belum ada	Masih dalam proses
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja	Perlu ditambahkan kompetensi role model, dokumentasi rapat, SPT, PK dan RKT terbaru	Masih dalam proses
2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Perlu menambahkan dokumen yang dapat menunjukan bahwa pustik telah melakukan inovasi yang selaras pada SOP yang mengacu pada peta proses bisnis.	Sudah ditindaklanjuti.
		b	E-Office	perlu menambahkan :	Masih dalam proses

				<ul style="list-style-type: none"> - capture aplikasi SKP - capture SKP salah satu pegawai di pustik - Aplikasi SKP sampai dengan level individu - Pengisian SKP secara berkala (kegiatan bulanan dan harian) 	
		c	Keterbukaan Informasi Publik	<p>TIK perlu menambahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - capture lakip TIK di website - capture aplikasi mk yg ada di playstore - bisa menambahkan data/informasi yang dimiliki TIK 	Masih dalam proses
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Dapat dilengkapi lagi tentang dokumen sosialisasi perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.	Sudah ditindaklanjuti
		b	Pola Mutasi Internal	<p>Mohon untuk memperbaiki dokumen (dokumen existing merupakan dokumen biro umum)</p> <p>Mohon untuk melengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan Jabatan Pegawai di PUSTIK 2. Usulan Penataan Pegawai di PUSTIK 	Masih dalam proses

				3. Persandingan Uraian Jabatan Pemangku Jabatan dengan pelaksanaan tupoksi pegawai di PUSTIK 4. Penyusunan analisis Gap Kompetensi pegawai di PUSTIK	
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Dapat melengkapi dokumen terkait: 1. Dokumen Penilaian Mandiri Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai 2. Dokumen hasil Penilaian Mandiri 3. Dokumen analisis hasil Penilaian Mandiri	Masih dalam proses
		d	Penetapan Kinerja Individu	-	
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Dapat melengkapi dokumen terkait inovasi yang telah dilakukan terkait aturan disiplin pegawai.	Sudah ditindaklanjuti
		f	Sistem Informasi Kepegawaian	-	
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan	SKP Bulanan cukup sampel aja misal SKP Pak Sigit, Mba Yanti dan Uda Jefri. Ditambahkan dokumentasi rapat-rapat.	Sudah ditindaklanjuti

		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan tindak lanjut kinerja bisa dimasukkan bila ada. - Laporan kinerja anggaran bisa dimasukkan juga. - Capture serapan anggaran yang ada di website utama MK (MKRI.ID) 	Sudah ditindaklanjuti
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Public Campaign inspektorat bisa dimasukkan juga untuk evidence. - Sosialisasi gratifikasi yang dilakukan kemarin oleh KPK juga bisa dimasukkan sebagai evidence. - Ambil dari inspektorat terkait pengendalian gratifikasi. - Minta laporan gratifikasi dari inspektorat kemudian dibuat sesuai kebutuhan PUSTIK 	Sudah ditindaklanjuti
		b	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan SOP, Soft Control & Hard Control, Kode Etik, Pakta Integritas, SK Tim SPIP per unit kerja (SPIP terintegrasi ke depannya) - Review kembali manajemen resiko yang sudah ada dan disesuaikan 	Sudah ditindaklanjuti

			<p>dengan kondisi saat ini (koordinasi dengan Pak Wijang serta buat manajemen resiko yang baru).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum sampai ke rencana tindak pengendalian, baru sekedar manajemen resiko - Deliver SOP kepada stakeholdernya misal dalam pengelolaan Video Conference 	
		c	<p>Pengaduan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK PIC Lapor per unit kerja, jalur pengaduan, e-lapor, SOP Penanganan Pengadaan, SK Tim penanganan pengadaan - E-Kiosk, Laporan setiap kegiatan Foto yang sudah ditindaklanjuti - Pak Sigit memberikan contoh Survei Eksternal → Hubungi MK di web, Survei Internal → Troubleshoot 	Sudah ditindaklanjuti
		d	<p>Whistle-Blowing System</p> <p>Minta ke inspektorat terkait evidence-nya yang tahun 2022</p>	Sudah ditindaklanjuti
		e	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - bisa minta ke inspektorat terkait evidence-nya untuk tahun 2022 	Sudah ditindaklanjuti

				- Perlu adanya identifikasi benturan kepentingan sedang dibangun oleh Inspektorat	
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan	Persekjen Pelayanan Publik SOP pelayanan TIK	Sudah ditindaklanjuti
		b	Budaya Pelayanan Prima	Bisa ditambahkan bimbingan teknis penanganan perkara pemilihan kepala daerah	Sudah ditindaklanjuti
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Ditambahkan hasil e-Voting	Sudah ditindaklanjuti

BAB III

PENUTUP

Hasil pemantauan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menunjukkan bahwa secara umum tim kerja telah melaksanakan rencana kegiatan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil monev. Proses monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan dan tujuan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diharapkan menjadi acuan bagi tim kerja untuk menentukan langkah-langkah kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

**LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN MEI 2022**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk memastikan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, maka tim kerja melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini memuat catatan atas hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja. Catatan tindak lanjut tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahap rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jakarta, Mei 2022

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas

Jefriyanto

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memantau perkembangan dan sejauh mana realisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi/masukan atas proses realisasi rencana kerja, guna membantu mengukur pencapaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah untuk mengamati perkembangan dan kemajuan dari kinerja tim pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi, target yang telah ditetapkan, dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN MEI 2022

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - segera di unggah ke LKE Microsite Pustik - Berita acara masih draft 	Sudah ditindaklanjuti
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas unit Pusat TIK perlu di sempurnakan dengan time rencana kerja agar lebih terarah	Sudah ditindaklanjuti
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Laporan monitoring dan evaluasi dibuat secara berkala sesuai dengan rencana kerja	Sudah ditindaklanjuti
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja	Semua anggota telah terlibat dalam pembangunan ZI, namun perlu dilapirkan juga: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI 	Sudah ditindaklanjuti

				<p>2. Daftar hadir sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PUSTIK yang diikuti oleh seluruh pegawai PUSTIK</p> <p>3. Dapat ditambahkan evidence lain yang sesuai</p>	
2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Perlu menambahkan dokumen hasil tindaklanjut atas perbaikan SOP yang terbaru tahun 2022	Sudah ditindaklanjuti
b		E-Office	<ul style="list-style-type: none"> - dokumen terkait pengembangan absensi selama pandemi, rekap absen wfo wfh, contoh fitur absen, pemotongan absen ketika terlambat , fitur pengajuan cuti dll yg perhubungan dengan pengembangan teknologi - Pustik perlu menambahkan pembangunan aplikasi yang telah dilakukan 	Sudah ditindaklanjuti	
c		Keterbukaan Informasi Publik	<p>TIK perlu menambahkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lap bulanan penggunaan aplikasi SIMPEL 	Sudah ditindaklanjuti	

				- Laporan monitoring pengembangan dan penggunaan Aplikasi di TIK	
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Mohon dapat dilengkapi dengan dokumen DUK ASN Pustik, Daftar nama pegawai kontrak dan PPNPN Pustik dan Data rekrutmen PPNPN Programmer dan Network	Sudah ditindaklanjuti
		b	Pola Mutasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilengkapi lagi dengan dokumen usulan nama pegawai yang mutasi - Segera upload dokumen ke google drive 	Sudah ditindaklanjuti
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat melengkapi dokumen analisis gap kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan (analisis komparasi dan uraian kompetensi pegawai(SKP) dengan anjab) - segera di unggah ke Google Drive 	Sudah ditindaklanjuti
		d	Penetapan Kinerja Individu	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti

		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		f	Sistem Informasi Kepegawaian	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilengkapi dengan dokumen LAKIP PUSTIK dan LAKIP Lembaga - Dapat segera diupload ke Microsite Pustik 	Sudah ditindaklanjuti
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - dapat melengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cascading PUSTIK 2. PK PUSTIK 3. Rencana Pembangunan ZI 4. Renstra dan Road Map 5. TOR dan RAB Kegiatan 6. Rencana Kegiatan PUSTIK 7. Kalender Kegiatan PUSTIK 8. penetapan Role Model dan Agen Perubahan PUSTIK 	Sudah ditindaklanjuti
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi	Perlu menambahkan laporan gratifikasi terbaru tahun 2022	Sudah ditindaklanjuti

		b	Penerapan SPIP	Update data dukung dengan yang baru setiap bulan	Sudah ditindaklanjuti
		c	Pengaduan Masyarakat	Update data laporan pengaduan dengan yang baru setiap bulan	Sudah ditindaklanjuti
		d	Whistle-Blowing System	Minta laporan WBS ke Inspektorat	Sudah ditindaklanjuti
		e	Penanganan Benturan Kepentingan	Segera upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - ditambah eviden yang memuat inovasi-inovasi yang dilakukan TIK - data/dokumen yang dapat menunjukkan bahwa SOP telah diterapkan (photo,video, atau dokumen lain) - SOP telah sesuai karakteristik pelayanan di TIK 	Sudah ditindaklanjuti
		b	Budaya Pelayanan Prima	Upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti

BAB III

PENUTUP

Hasil pemantauan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menunjukkan bahwa secara umum tim kerja telah melaksanakan rencana kegiatan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil monev. Proses monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan dan tujuan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diharapkan menjadi acuan bagi tim kerja untuk menentukan langkah-langkah kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

**LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN JUNI 2022**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk memastikan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, maka tim kerja melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini memuat catatan atas hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja. Catatan tindak lanjut tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahap rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Jakarta, Juni 2022

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas

Jefriyanto

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memantau perkembangan dan sejauh mana realisasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi/masukan atas proses realisasi rencana kerja, guna membantu mengukur pencapaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022.

III. TUJUAN

Tujuan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pelaksanaan pembangunan Zona Integritas adalah untuk mengamati perkembangan dan kemajuan dari kinerja tim pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah rencana aksi, target yang telah ditetapkan, dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PERIODE BULAN JUNI 2022

NO	KOMPONEN	INDIKATOR		REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT
1	Manajemen Perubahan	a	Penyusunan Tim Kerja	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		b	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		c	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		d	Perubahan Pola Pikir Dan Budaya Kerja	Perlu ditambahkan dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI	Sudah ditindaklanjuti
2	Penataan Tata Laksana	a	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Perlu menambahkan dokumen SOP yang terbaru	Sudah ditindaklanjuti
		b	E-Office	Pustik perlu menambahkan pembangunan aplikasi yang telah dilakukan	Sudah ditindaklanjuti
		c	Keterbukaan Informasi Publik	Perlu menambahkan laporan bulanan penggunaan aplikasi publik	Sudah ditindaklanjuti

3	Penataan Sistem Manajemen SDM	a	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		b	Pola Mutasi Internal	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		c	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		d	Penetapan Kinerja Individu	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		e	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		f	Sistem Informasi Kepegawaian	Dapat segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a	Keterlibatan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilengkapi dengan dokumen LAKIP PUSTIK dan LAKIP Lembaga - Dapat segera diupload ke Microsite Pustik 	Sudah ditindaklanjuti
		b	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - dapat melengkapi dokumen: 1. Renstra dan Road Map 2. TOR dan RAB Kegiatan 	Sudah ditindaklanjuti
5	Penguatan Pengawasan	a	Pengendalian Gratifikasi	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		b	Penerapan SPIP	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti

		c	Pengaduan Masyarakat	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		d	Whistle-Blowing System	Segera di unggah ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		e	Penanganan Benturan Kepentingan	Segera upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	a	Standar Pelayanan	Ditambah eviden yang memuat inovasi- inovasi yang dilakukan TIK	Sudah ditindaklanjuti
		b	Budaya Pelayanan Prima	Upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti
		c	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Upload ke Microsite Pustik	Sudah ditindaklanjuti

BAB III

PENUTUP

Hasil pemantauan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menunjukkan bahwa secara umum tim kerja telah melaksanakan rencana kegiatan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil monev. Proses monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan dan tujuan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan diharapkan menjadi acuan bagi tim kerja untuk menentukan langkah-langkah kerja pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi kedepannya.

Demikian Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.